



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

PENGUMUMAN

NOMOR : 01/Pansel/Japati/03/2019

TENTANG

SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA PADA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2019

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Mahkamah Agung RI tahun 2019, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian/Lembaga, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil/Prajurit TNI yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Ketentuan Umum

A. Jabatan yang akan diisi melalui seleksi terbuka adalah :

No	Nama Jabatan	Eselon	Formasi
1	Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum	I.a	1 orang
2	Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	I.a	1 orang
3	Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama	II.a	1 orang
4	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbang Diklat Kumdil)	II.a	1 orang
5	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer	II.a	1 orang
6	Sekretaris Pengadilan Tinggi Bengkulu	II.b	1 orang
7	Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus	II.b	1 orang

B. Persyaratan Administrasi

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, khusus untuk Jabatan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi

Peradilan Militer dapat dilamar oleh Pegawai Negeri Sipil/Prajurit TNI;

3. Dengan syarat kepangkatan dan jabatan sebagai berikut:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I.a):
 - 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembina Utama Madya (IV/d);
 - 2) Bagi Prajurit TNI yang melamar Jabatan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sekurang-kurangnya berpangkat Brigadir Jenderal TNI/Laksamana Pertama TNI/Marsekal Pertama TNI;
 - 3) Sekurang-kurangnya sedang atau telah dua tahun dalam jabatan pimpinan tinggi pratama/struktural Eselon II.a atau minimal pernah menduduki jabatan Ketua/Kepala Pengadilan Kelas IA/Pengadilan Tipe A atau Fungsional Ahli Utama atau yang disetarakan;
 - b. Jabatan Tinggi Pratama (Eselon II.a)
 - 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembina Tk. I (IV/b);
 - 2) Minimal dua tahun dalam jabatan administrator/struktural Eselon III.a atau Fungsional Ahli Madya atau yang disetarakan;
 - 3) Bagi Prajurit TNI yang melamar Jabatan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer sekurang-kurangnya berpangkat Kolonel;
 - c. Jabatan Tinggi Pratama (Eselon II.b)
 - 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembina (IV/a);
 - 2) Minimal dua tahun dalam jabatan administrator/struktural Eselon III atau Fungsional Ahli Madya atau yang disetarakan;
4. Berusia paling tinggi:
 - a. 58 tahun per 1 April 2019 untuk pelamar formasi Eselon I.a. dan 56 tahun per 1 April 2019 untuk pelamar formasi Eselon II;
 - b. Khusus untuk pelamar dari Prajurit TNI berusia 55 tahun per 1 April 2019 untuk pelamar formasi Eselon I.a. dan 53 tahun per 1 April 2019 untuk pelamar formasi Eselon II;
5. Kualifikasi pendidikan minimal Strata 1 atau setara;
6. Seluruh unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir;
7. *Print out/photo copy* tanda terima/pemberitahuan e-LHKPN dari KPK tahun 2018;
8. *Print out/photo copy* tanda terima penyerahan SPT tahun 2018;

9. Tidak pernah/tidak sedang dijatuhi hukuman pidana penjara, hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat;
10. Mendapat persetujuan dari atasan langsung untuk pelamar dari Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
11. Mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk pelamar dari Kementerian/Lembaga (K/L) di luar Mahkamah Agung dan Persetujuan Panglima TNI untuk pelamar dari Prajurit TNI;
12. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani di atas meterai Rp.6.000,- yang ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
13. Sehat jasmani berdasarkan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah;
14. Peserta hanya dapat melamar pada 1 (satu) jabatan.

C. Persyaratan Khusus

1. Memiliki kompetensi manajerial dan sosio kultural;
2. Peserta Seleksi harus memiliki kemampuan:
 - a) Mengimplementasikan kebijakan Mahkamah Agung RI;
 - b) Administrasi umum (*man, money, material*);
 - c) Memahami Teknologi Informasi.
3. Bagi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum:
 - a) Memiliki konsepsi perencanaan program dan kebijakan di lingkungan Mahkamah Agung;
 - b) Mampu mengorganisasi pelaksanaan program dan kebijakan pengembangan manajemen dan kepemimpinan di lingkungan Mahkamah Agung.
 - c) Mampu melaksanakan evaluasi program dan kebijakan, manajemen dan kepemimpinan di lingkungan Mahkamah Agung.
 - d) Memiliki kemampuan komunikasi dalam organisasi
 - e) Memiliki pengetahuan dan pemahaman teknis yustisial.
4. Bagi Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara:
 - a) Memiliki konsepsi perencanaan program dan kebijakan di lingkungan Mahkamah Agung;
 - b) Mampu mengorganisasi pelaksanaan program dan kebijakan pengembangan manajemen dan kepemimpinan di lingkungan Mahkamah Agung.
 - c) Mampu melaksanakan evaluasi program dan kebijakan, manajemen dan kepemimpinan di lingkungan Mahkamah Agung.
 - d) Memiliki kemampuan komunikasi dalam organisasi
 - e) Memiliki pengetahuan dan pemahaman teknis yustisial.

5. Bagi Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama peserta harus memiliki kompetensi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, kriteria, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi dibidang administrasi peradilan agama;
6. Bagi Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil :
 - a) Memiliki konsep perencanaan program dan kebijakan dalam pendidikan dan pelatihan tenaga teknis di lingkungan Mahkamah Agung;
 - b) Mampu mengimplementasikan program SDM bidang teknis peradilan.
 - c) Mampu mengevaluasi program SDM bidang teknis peradilan.
 - d) Memiliki kemampuan komunikasi dalam organisasi;
7. Bagi Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer peserta harus memiliki kompetensi :
 - a) Mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan, standar, norma, kriteria, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi dibidang administrasi peradilan militer;
 - b) Memiliki pengetahuan dan pemahaman teknis yustisial.
8. Bagi Sekretaris Pengadilan peserta harus memiliki kompetensi perencanaan dan pengelolaan unit pendukung Pengadilan dan diutamakan yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.

II. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan mulai **tanggal 11 Maret s.d. 01 April 2019**
2. Lamaran ditujukan kepada panitia seleksi dengan dilengkapi:
 - a. *Print out* registrasi pendaftaran *online*;
 - b. Surat Lamaran (format terlampir);
 - c. Daftar Riwayat Hidup (format terlampir);
 - d. Foto Copy SK Pangkat terakhir dan SK jabatan yang disyaratkan;
 - e. Foto Copy KTP yang masih berlaku;
 - f. Foto Copy Ijazah terakhir;
 - g. Foto Copy Penilaian Prestasi Kerja dua tahun terakhir;
 - h. *Print out* /Foto Copy Bukti tanda terima LHKPN dari KPK;
 - i. *Print out*/Foto Copy tanda terima penyerahan SPT tahun 2018;
 - j. Foto Copy Sertifikat keahlian yang dimiliki;
 - k. Surat Keterangan Sehat dari dokter rumah sakit pemerintah;
 - l. Surat pernyataan *Professional Exposure* (format terlampir);
 - m. Surat persetujuan dari atasan langsung (format terlampir);
 - n. Surat persetujuan dari PPK untuk pelamar dari K/L dan persetujuan Panglima TNI untuk pelamar dari Prajurit TNI;

- o. Surat pernyataan tidak pernah/tidak sedang dalam proses dijatuhi hukuman pidana penjara, hukuman disiplin tingkat sedang/berat yang dibubuhi materai Rp.6000,- dan diketahui oleh atasan langsung disertai stempel dinas (format terlampir);
3. Seluruh dokumen persyaratan administrasi harus disampaikan dalam amplop tertutup mulai tanggal 11 Maret 2019 (cap pos) dan diterima paling lambat tanggal 1 April 2019 ditujukan kepada:

PANITIA SELEKSI TERBUKA
JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA
PADA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2019

 d/a. BIRO KEPEGAWAIAN BADAN URUSAN ADMINISTRASI,
 MAHKAMAH AGUNG RI, GEDUNG G LT. 3
 JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13 JAKARTA PUSAT KODE POS 10110

Tahapan Seleksi/Jadwal Pendaftaran dan Seleksi

No	Kegiatan	Tanggal*)	Keterangan
1.	Pengumuman	11 s.d. 25 Maret 2019	Diumumkan melalui <i>website</i> resmi Mahkamah Agung RI
2.	Pendaftaran secara Online dan Penerimaan Berkas Administrasi	11 Maret s.d. 01 April 2019	
3.	Seleksi Administrasi	01 s.d. 05 April 2019	
4.	Pengumuman hasil seleksi administrasi	08 April 2019	
5.	<i>Assessment Center</i>	10 s.d. 12 April 2019	
6.	Penelusuran Rekam Jejak	08 s.d. 26 April 2019	
7.	Penulisan Makalah dan Bahan Presentasi Makalah	29 April s.d 01 Mei 2019	
8.	Penilaian Kompetensi (Presentasi dan Wawancara)	30 April s.d 02 Mei 2019	
9.	Pengumuman Hasil Seleksi	06 Mei 2019	

Catatan:

*) Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan melalui *website* Mahkamah Agung.

III. Ketentuan lain

- Dokumen/berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan, apabila persyaratan yang dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan maka dokumen/berkas tidak diproses;
- Pendaftaran dilakukan melalui *website* resmi Mahkamah Agung RI dengan alamat <http://pejabatonline.mahkamahagung.go.id>;

3. Mahkamah Agung dan Panitia Seleksi tidak mengadakan bimbingan tes atau persiapan pendahuluan dalam rangka Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama;
4. Dalam seleksi ini **TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM BENTUK APAPUN;**
5. Setiap perkembangan informasi seleksi ini disampaikan melalui *website* resmi **<https://www.mahkamahagung.go.id>**;
6. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh peserta selama melaksanakan proses seleksi ditanggung oleh peserta;
7. Keputusan panitia seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Mahkamah Agung RI bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
8. Selama proses seleksi sampai dengan pengangkatan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, apabila diketahui peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar, Panitia Seleksi berhak menggugurkan keikutsertaan/kelulusan yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Maret 2019



S. PUDDJOHARSOYO